



Penanganan Aksi Separatisme Organisasi Papua Merdeka di Wilayah Kabupaten Nduga Melalui Strategi Operasi Intelijen F3ead (Studi Kasus: Penangkapan Yomse Lokbere)

Okky Trisasoma Yudhistira^{1*}, Rodon Pedrason², Stepri Anriani³

Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Indonesia^{1, 2, 3}

Email: okkytrisasoma@icloud.com^{1*}, rodonpedrason65@gmail.com²,
steprianrianiindonesia@gmail.com³

Abstract

Keywords:

Operasi Intelijen, F3EAD, Separatisme, Papua, OPM, Kabupaten Nduga

Separatisme bersenjata di Papua, khususnya yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), merupakan ancaman keamanan nasional yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kabupaten Nduga menjadi salah satu wilayah dengan intensitas konflik tinggi akibat kombinasi faktor geografis ekstrem, dinamika sosial-budaya lokal, serta struktur organisasi separatis yang adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala dan strategi operasi intelijen aparat intelijen gabungan dalam penanganan aksi separatisme OPM melalui penerapan metode F3EAD (Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze, dan Disseminate), dengan studi kasus penangkapan Yomse Lokbere pada periode 2022–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui analisis dokumen, laporan operasi, dan kerangka konseptual intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi intelijen di Nduga menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan akses wilayah, resistensi sosial masyarakat lokal, fragmentasi internal OPM, serta tantangan koordinasi lintas lembaga. Namun demikian, penerapan F3EAD terbukti efektif dalam meningkatkan presisi penargetan, mempercepat siklus pengambilan keputusan, dan meminimalkan eskalasi kekerasan. Dari perspektif analisis intelijen, penelitian ini menegaskan bahwa F3EAD mendukung fungsi intelijen secara komprehensif, meliputi deteksi dini, peringatan dini, peramalan ancaman, dan pemecahan masalah operasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian intelijen domestik dengan menegaskan relevansi pendekatan intelijen berbasis siklus operasional dalam penanganan separatisme bersenjata di Papua.

INTRODUCTION

Separatisme bersenjata saat ini tidak hanya menjadi isu keamanan domestik, tetapi juga bagian dari dinamika geopolitik global yang terus berkembang. Kelompok separatis kini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, jejaring internasional, dan ketidakpuasan historis untuk memperkuat tuntutan kemerdekaan, sebagaimana terlihat di berbagai konflik etno-politis di Asia dan Afrika (Kilcullen, 2022). Di Indonesia, salah satu konflik separatis yang paling menonjol adalah perlawanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) bersama sayap bersenjatanya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade (Kingsbury, 2021).

Kabupaten Nduga menjadi salah satu episentrum konflik dengan intensitas kekerasan bersenjata yang tinggi. Serangkaian insiden seperti penyanderaan, pembunuhan aparat, serta

sabotase infrastruktur strategis, memperlihatkan bahwa kelompok separatis telah menjadikan wilayah ini sebagai basis operasional utama mereka (Kompas TV, 2023). Situasi tersebut memerlukan pendekatan penanganan yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berbasis intelijen strategis yang responsif dan presisi.

Pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga intelijen negara telah mengadopsi metode operasi taktis berbasis F3EAD (Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze and Disseminate) yang merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh militer Amerika Serikat dalam konteks kontra-terorisme (Flynn, Pottinger, & Batchelor, 2010). Model ini dinilai efektif dalam menanggulangi aktor non-negara yang memiliki jaringan kompleks, serta mampu mempersingkat siklus pengambilan keputusan di medan operasi (Cordesman, 2023).

Salah satu kasus yang relevan dalam konteks ini adalah operasi penangkapan Yomse Lokbere, salah satu tokoh lapangan OPM, yang dilaksanakan oleh satuan gabungan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri di Kabupaten Nduga pada tahun 2023. Operasi ini menjadi gambaran konkret bagaimana F3EAD diimplementasikan dalam medan konflik domestik untuk menetralkan tokoh kunci separatis (Kompas TV, 2023). Keberhasilan operasi tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan intensitas kekerasan di wilayah tersebut, tetapi juga memperkuat kapabilitas negara dalam merespons ancaman yang bersifat adaptif dan berkelanjutan.

Namun, implementasi strategi tersebut juga tidak terlepas dari tantangan yang bersifat struktural maupun operasional. Kompleksitas geografi Papua, keterbatasan interoperabilitas antar lembaga, serta dinamika sosial-budaya lokal seringkali menjadi kendala signifikan dalam efektivitas pelaksanaan operasi intelijen (Butt & Lindsey, 2011). Oleh karena itu, kajian akademik diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi intelijen seperti F3EAD diterapkan dalam konteks lokal, serta apa saja hambatan yang dihadapi di lapangan.

Landasan Teori dan Konsep

Strategi dipahami sebagai integrasi rasional antara tujuan, metode, dan sumber daya untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian (Freedman, 2013). Konsep strategi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Ends–Ways–Means yang dikemukakan oleh Lykke (2001), di mana keberhasilan strategi bergantung pada keseimbangan antara tujuan yang jelas, metode yang tepat, dan sumber daya yang memadai. Intelijen dalam perspektif negara memiliki tiga dimensi utama, yaitu sebagai organisasi, aktivitas, dan produk pengetahuan (Lowenthal, 2017). Sebagai aktivitas, intelijen mencakup penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang dilaksanakan secara terencana dan tertutup untuk mendukung pengambilan keputusan strategis (Anriani, 2018). Operasi intelijen dipahami sebagai tindakan khusus yang dilaksanakan di luar aktivitas rutin dengan batasan ruang dan waktu tertentu atas mandat otoritas negara (Manulang, 2001).

Separatisme secara teoretis merupakan gerakan politik yang bertujuan memisahkan diri dari negara induk untuk membentuk entitas politik baru yang berdaulat (Gurr, 1993). Dalam konteks Papua, separatisme OPM berakar pada klaim self-determination yang dipersepsikan tidak terpenuhi pasca-Pepera 1969 (MacLeod, 2011). Oleh karena itu, separatisme Papua tidak dapat dipahami semata sebagai kriminalitas, tetapi sebagai konflik politik yang dimanifestasikan melalui kekerasan bersenjata (Kingsbury, 2021).

Konsep kolaborasi antar lembaga menjadi elemen penting dalam operasi intelijen modern, terutama dalam menghadapi aktor non-negara yang adaptif (Bryson et al., 2015).

Kolaborasi lintas institusi memungkinkan integrasi informasi, pengambilan keputusan kolektif, dan efektivitas operasi berbasis intelijen (Emerson et al., 2012). Dalam penelitian ini, kolaborasi menjadi fondasi penerapan F3EAD oleh aparat intelijen gabungan di Kabupaten Nduga. F3EAD merupakan metodologi *targeting* yang dirancang untuk mempercepat siklus intelijen-operasional melalui integrasi pengumpulan, analisis, dan aksi (Flynn et al., 2010). Metode ini menekankan kesinambungan antar tahap sehingga memungkinkan adaptasi cepat terhadap dinamika ancaman di lapangan (Deptula, 2001).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada analisis implementasi strategi operasi intelijen F3EAD dalam penanganan aksi separatisme Organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Nduga pada periode 2022–2023. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data yang berkaitan dengan operasi intelijen di wilayah penelitian, seperti dokumen resmi, laporan operasi, serta informasi dari pihak terkait. Sampel data ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan langsung dengan kasus penangkapan Yomse Lokbere. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *non-probability sampling* dengan fokus pada informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap objek penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara mendalam (*in-depth interview guide*), lembar observasi, serta format dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Uji validitas dilakukan melalui teknik *triangulasi sumber*, *triangulasi metode*, dan *triangulasi teori* guna memastikan keabsahan data yang diperoleh, sedangkan reliabilitas dijaga melalui konsistensi proses pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran kontekstual yang komprehensif. Prosedur penelitian dimulai dari tahap perumusan masalah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis.

Dalam proses pengolahan data, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak seperti NVivo untuk membantu proses pengkodean dan analisis data kualitatif secara sistematis. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik dengan mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berulang untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar variabel yang relevan dengan implementasi strategi F3EAD. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam serta kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan studi intelijen dan keamanan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala yang Dihadapi oleh Aparat Intelijen Gabungan dalam Penanganan Aksi Separatisme Organisasi Papua Merdeka melalui Strategi Operasi Intelijen di Wilayah Kabupaten Nduga pada Periode Tahun 2022–2023 dalam Kasus Penangkapan Yomse Lokbere

Penanganan aksi separatisme OPM di Kabupaten Nduga menghadapi kendala struktural dan operasional yang bersifat multidimensional, terutama disebabkan oleh karakter geografis wilayah yang ekstrem dan sulit dijangkau (International Crisis Group, 2022). Kondisi topografi berupa pegunungan terjal, hutan lebat, serta minimnya infrastruktur transportasi

menyebabkan keterbatasan mobilitas aparat intelijen dan menghambat proses pengumpulan informasi secara cepat dan akurat (Schroden, 2022).

Kendala berikutnya bersumber dari faktor sosial dan kultural masyarakat lokal yang memiliki ikatan kekerabatan kuat dengan anggota kelompok separatis, sehingga menciptakan lingkungan operasi yang tertutup terhadap aparat negara (Kingsbury, 2021). Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat berdampak langsung pada efektivitas HUMINT, karena sumber informasi potensial enggan memberikan keterangan yang bersifat sensitif (Braithwaite et al., 2010). Selain itu, fragmentasi internal OPM yang terbagi ke dalam berbagai faksi dan kodap memperumit proses pemetaan struktur organisasi dan identifikasi aktor kunci di lapangan (MacLeod, 2011). Kondisi ini menyebabkan informasi intelijen sering kali bersifat parsial dan membutuhkan proses verifikasi berlapis sebelum dapat digunakan sebagai dasar tindakan operasional (Lowenthal, 2017).

Keterbatasan sarana komunikasi dan pengawasan teknologi juga menjadi kendala signifikan, mengingat wilayah Nduga memiliki keterjangkauan sinyal yang rendah serta minim dukungan sistem ISR berbasis teknologi tinggi (Flynn et al., 2010). Situasi tersebut meningkatkan ketergantungan pada intelijen manusia, yang pada saat yang sama menghadapi resistensi sosial yang kuat (Soegirman, 2012). Secara institusional, tantangan koordinasi lintas lembaga juga muncul akibat perbedaan kultur organisasi, prosedur kerja, dan kewenangan antara aparat intelijen, TNI, dan Polri (Bryson et al., 2015). Tanpa mekanisme kolaborasi yang solid, fragmentasi informasi berpotensi menurunkan efektivitas operasi intelijen terpadu (Emerson et al., 2012).

Strategi Operasi Intelijen oleh Aparat Intelijen Gabungan dalam Penanganan Aksi Separatisme Organisasi Papua Merdeka di Wilayah Kabupaten Nduga pada Periode Tahun 2022–2023 dalam Kasus Penangkapan Yomse Lokbere

Strategi operasi intelijen yang diterapkan aparat intelijen gabungan dalam penanganan aksi separatisme OPM di Kabupaten Nduga menggunakan pendekatan F3EAD sebagai kerangka kerja operasional yang adaptif dan berbasis siklus intelijen cepat (McChrystal et al., 2015). Pendekatan ini memungkinkan integrasi yang erat antara pengumpulan informasi, analisis intelijen, dan tindakan penegakan hukum berbasis presisi (Deptula, 2001). Pada tahap Find, aparat intelijen memanfaatkan kombinasi intelijen manusia (HUMINT) dan intelijen sinyal (SIGINT) untuk mengidentifikasi keberadaan, jaringan, serta pola aktivitas Yomse Lokbere dalam struktur Kodap III Ndugama (Flynn et al., 2010). Proses ini dilakukan secara bertahap untuk mengurangi risiko kebocoran informasi dan salah identifikasi target di lingkungan sosial yang tertutup (Kingsbury, 2021).

Tahap Fix diarahkan pada penetapan lokasi target secara akurat dalam dimensi ruang dan waktu melalui validasi lintas sumber dan pengamatan berkelanjutan (Clarke, 2012). Penetapan ini menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa tindakan operasional dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan prinsip legalitas serta perlindungan masyarakat sipil (International Crisis Group, 2022). Tahap Finish diwujudkan melalui tindakan penangkapan Yomse Lokbere dengan pendekatan penegakan hukum berbasis intelijen, yang menekankan presisi, kecepatan, dan minimalisasi eskalasi kekerasan (McChrystal et al., 2015). Keberhasilan tahap ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan koersif menuju pendekatan intelijen-presisi dalam menangani aktor separatis bersenjata (Lowenthal, 2017).

Pasca-penangkapan, tahap Exploit dilakukan dengan memanfaatkan seluruh material intelijen yang diperoleh dari target, termasuk dokumen, alat komunikasi, dan informasi jaringan pendukung (Deptula, 2001). Eksploitasi ini bertujuan untuk membuka struktur organisasi OPM secara lebih luas serta mengidentifikasi potensi target lanjutan dalam jaringan Kodap III Ndugama (Flynn et al., 2010). Tahap Analyze mencakup pengolahan dan integrasi hasil eksploitasi dengan basis data intelijen yang telah ada untuk mengungkap pola operasi, jalur logistik, serta relasi antar aktor separatis (Lowenthal, 2017). Analisis ini berfungsi memperpendek siklus intelijen berikutnya dan memperkuat kapasitas prediktif aparat keamanan dalam menghadapi potensi eskalasi lanjutan (Mandel & Irwin, 2021).

Tahap terakhir, Disseminate, dilakukan melalui penyampaian hasil analisis kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk unsur operasional dan pengambil kebijakan, guna mendukung pengambilan keputusan lanjutan yang bersifat preventif dan strategis (Flynn et al., 2010). Proses diseminasi yang tepat waktu dan relevan memastikan bahwa informasi intelijen tidak berhenti sebagai produk analisis, tetapi menjadi dasar tindakan nyata dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nduga (Emerson et al., 2012). Dengan demikian, strategi operasi intelijen dalam kasus penangkapan Yomse Lokbere menunjukkan bahwa F3EAD berfungsi sebagai siklus berkelanjutan yang menghubungkan tindakan taktis dengan kepentingan strategis negara dalam penanganan separatisme bersenjata.

Analisis Intelijen

Dari perspektif analisis intelijen, penerapan F3EAD dalam kasus penangkapan Yomse Lokbere mencerminkan fungsi early detection melalui kemampuan mendeteksi indikasi awal aktivitas separatis bersenjata (Saronto, 2012). Deteksi dini ini memungkinkan aparat intelijen mengidentifikasi potensi ancaman sebelum berkembang menjadi eskalasi kekerasan yang lebih luas (Yusgiantoro, 2008). Fungsi early warning terwujud melalui penyusunan peringatan intelijen berbasis analisis pola serangan, pergerakan logistik, dan komunikasi internal OPM (Lowenthal, 2017). Informasi peringatan ini menjadi dasar pengambilan keputusan taktis bagi aparat keamanan di wilayah Nduga (Flynn et al., 2010).

Dalam konteks forecasting, hasil eksploitasi dan analisis pasca-penangkapan digunakan untuk memproyeksikan potensi reaksi balik dari jaringan OPM, termasuk kemungkinan fragmentasi lanjutan atau upaya balasan (Mandel & Irwin, 2021). Proyeksi ini penting untuk merancang langkah pencegahan lanjutan yang bersifat anticipatory rather than reactive (Schroden, 2022). Fungsi problem solving tercermin dalam kemampuan intelijen untuk merumuskan opsi kebijakan dan operasional berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap dinamika konflik lokal (Anriani, 2018). Dengan demikian, intelijen tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan konflik separatis secara berkelanjutan (Lowenthal, 2017).

KESIMPULAN

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa separatisme bersenjata di Papua, khususnya di Nduga, merupakan ancaman keamanan nasional yang bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, historis, serta dinamika organisasi separatis yang adaptif. Oleh karena itu, penanganannya menuntut pendekatan intelijen yang presisi, terintegrasi, dan kolaboratif. Penelitian ini menemukan bahwa aparat intelijen gabungan menghadapi berbagai kendala signifikan dalam penanganan aksi separatisme OPM. Kendala

tersebut meliputi kondisi geografis yang ekstrem dan sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dan teknologi pendukung operasi intelijen, serta resistensi sosial masyarakat lokal yang memiliki ikatan kekerabatan dan emosional dengan kelompok separatis. Selain itu, fragmentasi internal OPM dan penggunaan pola gerilya oleh kelompok bersenjata menyebabkan proses identifikasi aktor kunci dan pemetaan jaringan menjadi lebih rumit. Kendala koordinasi lintas lembaga juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menyatukan prosedur kerja dan alur pertukaran informasi antar institusi yang terlibat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi operasi intelijen yang diterapkan aparat intelijen gabungan melalui metode F3EAD terbukti efektif dalam menangani kasus penangkapan Yomse Lokbere. Tahapan Find, Fix, dan Finish memungkinkan aparat intelijen melakukan identifikasi, validasi, dan penindakan terhadap target secara presisi dan berbasis informasi yang terverifikasi. Keberhasilan operasi ini sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas lembaga, integrasi intelijen manusia dan teknis, serta penegakan prinsip legalitas dan minimalisasi eskalasi kekerasan. Dari sudut pandang analisis intelijen, penerapan F3EAD dalam kasus ini memperlihatkan fungsi intelijen yang komprehensif, mencakup early detection, early warning, forecasting, dan problem solving. Intelijen berperan penting dalam mendeteksi indikasi awal ancaman, menyusun peringatan dini, memproyeksikan potensi eskalasi lanjutan, serta merumuskan opsi tindakan yang bersifat preventif dan adaptif. Dengan demikian, intelijen tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan konflik separatis secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan intelijen berbasis F3EAD merupakan model yang relevan dan kontekstual untuk menghadapi ancaman separatisme bersenjata di Papua.

REFERENCE

- Anriani, S. (2018). *Intelijen dan Politik Elektoral: Peran Intelijen dalam Dinamika Demokrasi Lokal*. RajaGrafindo Persada.
- Braithwaite, J., Dinnen, S., Allen, H., & Charlesworth, H. (2010). *Pillars and Shadows: Statebuilding as Peacebuilding in Solomon Islands*. ANU Press.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Clarke, R. A. (2012). *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It*. HarperCollins.
- Cordesman, A. H. (2023). *The Changing Global Security Environment*. Center for Strategic and International Studies.
- Cronin, A. K. (2023). Power to the people: How open technological innovation is arming tomorrow's terrorists. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Deptula, D. A. (2001). Effects-based operations: Change in the nature of warfare. *Air & Space Power Journal*, 15(1), 41–52.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Flynn, M. T., Pottinger, M., & Batchelor, P. (2010). *Fixing intelligence: A blueprint for making intelligence relevant in Afghanistan*. Washington, DC: Center for a New American Security.

- Fox, M. J. (2023). Optimizing the alternate targeting methodology F3EAD. *Military Review*, 103(2), 45–58.
- Freedman, L. (2013). *Strategy: A history*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- International Crisis Group. (2022). *Indonesia: Escalating conflict in Papua* (Asia Report No. 314). Brussels, Belgium: International Crisis Group.
- Kingsbury, D. (2021). *West Papua: The obliteration of a people* (4th ed.). Sydney, Australia: UNSW Press.
- Lowenthal, M. M. (2017). *Intelligence: From secrets to policy* (7th ed.). Washington, DC: CQ Press.
- Lykke, A. F. (2001). *Toward an understanding of military strategy*. Carlisle, PA: U.S. Army War College.
- MacLeod, J. (2011). *Self-determination and autonomy: The meaning of freedom*. London, United Kingdom: Routledge.
- Mandel, D. R., & Irwin, D. (2021). Tracking accuracy of strategic intelligence forecasts: Findings from a long-term Canadian study. *Intelligence and National Security*, 36(4), 520–540. <https://doi.org/10.1080/02684527.2020.1866737>
- McChrystal, S., Collins, T., Silverman, D., & Fussell, C. (2015). *Team of teams: New rules of engagement for a complex world*. New York, NY: Portfolio.
- Schroden, J. (2022). *Counterinsurgency challenges in complex terrain*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Soegirman, S. (2012). *Intelijen dan keamanan nasional*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Yusgiantoro, P. (2008). *Manajemen pertahanan: Teori dan aplikasi*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.